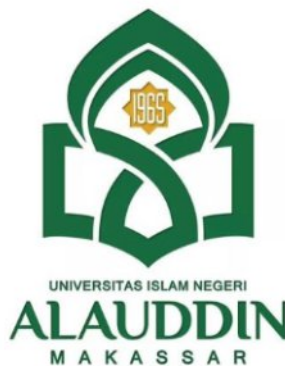


**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING KAITANNYA DENGAN
ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa
Kelas II B Tahun 2013-2015)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh

MUH.NASHARUDDIN CHAMANDA
NIM. 10100112014

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

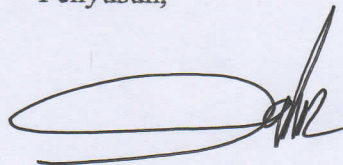
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nasharuddin Chamanda
NIM : 10100112014
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 4 Januari 1995
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Perum. Graha Indah Samata, Blok D5
Judul : EFEKTIVITAS SIDANG KELILING KAITANNYA
DENGAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA
RINGAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa
Tahun 2013-2015)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 3 Maret 2016

Penyusun,



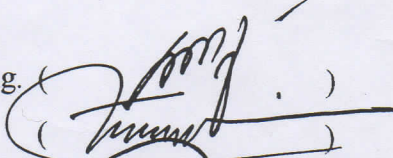
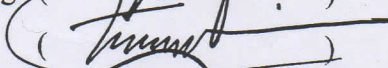



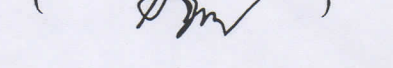
MUH. NASHARUDDIN. C
NIM: 10100112014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Sidang Keliling Kaitannya Dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (studi kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B Tahun 2013-2015)”, yang disusun oleh Muh. Nasharuddin Chamanda, NIM: 10100112014, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 M, bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 17 Maret 2016 M.
8 Jumadil Akhir 1437 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	()
Sekretaris	: Dr. Supardin, M.Hi.	()
Munaqisy I	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	()
Munaqisy II	: Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc, M.Hi.	()
Pembimbing I	: Dr. Hj. Patimah, M.Ag.	()
Pembimbing II	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.	()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016199031003

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذى انعم علينا بنعمة الايمان والاسلام, الصلوة والسلام على اشرف الانبياء
والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas sidang keliling kaitannya dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (studi kasus Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2013-2015)”. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Saw yang telah membawa ummat islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, baik itu secara moril maupun secara materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun merasa perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Musafir Pababbari, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Supardin, M.H.I., Selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Dr. Hj. Fatimah, M.Ag., Selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama sekaligus Dosen Pembimbing I yang selalu tulus memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Peradilan Agama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat memperoleh gelar sarjana.
7. Staf jurusan Peradilan Agama, Kak Sri yang telah banyak membantu penyusun selama penyusun menyelesaikan kuliah di UIN Alauddin.
8. Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H., Selaku Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa.
9. Dr. Mukhtaruddin B, S.HI., M.HI. Selaku Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan mengenai penelitian yang kami laksanakan.
10. Hasbi, S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa yang juga bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara mengenai penelitian yang kami laksanakan.
11. Kepada Bapak tercinta Drs. Akhiru, S.H. dan Ibu tercinta Saheriah yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan masukan kepada penyusun, serta adik-adikku Hafidzatul Azkia Chamanda, Muwafiqah Azizah Chamanda dan Muh. Farid Faqih Chamanda yang memberikan semangat kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

12. Kepada seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman terkhusus kepada Zakaria, Nursalam Rahmatullah dan Aprilia Selviaty Putri yang selalu mendoakan sehingga dan memberikan semangat kepada penyusun.
13. Kepada seluruh sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah dan Hukum Komisariat UIN Alauddin Cabang Gowa, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan pengalaman yang tak terlupakan.
14. Seluruh teman-teman di jurusan Peradilan Agama terkhusus kepada angkatan 2012 kelas A yang telah memberikan banyak kesan selama penyusun menempuh proses perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.
15. Kepada Munira Hamzah yang selalu memberikan masukan serta motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini.

Makassar, 3 Maret 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Sidang Keliling.....	11
B. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan.....	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	17
B. Pendekatan Penelitian.....	17
C. Sumber Data.....	17
D. Metode Pengumpulan data.....	18
E. Instrumen Penelitian.....	20
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	20

G. Pengujian Keabsahan Data.....	21
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
B. Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kaitannya Dengan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.....	35
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa.....	47
D. Implikasi Sidang Keliling Terhadap Pelayanan Hukum Kepada Pencari Keadilan di Kab. Gowa.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... و	<i>fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	a	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

--	--	--	--

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

B. Daftar Singkatan.

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	= subhanahu wa ta ala
saw.	= sallallahu alaihi wa sallam
M	= Masehi
H	= Hijriah
QS	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
SEMA	= Surat Edaran Mahkamah Agung

Nama : Muh. Nasharuddin Chamanda
NIM : 10100112014
Judul : EFEKTIVITAS SIDANG KELILING KAITANNYA DENGAN ASAS
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B Tahun 2013-2015)

ABSTRAK

Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu seberapa efektif sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dijabarkan kedalam submasalah yaitu apa faktor pendukung dan penghambat jalannya sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa dan bagaimana implikasi sidang keliling terhadap pelayanan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*).. Penelitian ini akan dilakukan dengan mencari keterangan dari para praktisi di Pengadilan Agama Sungguminasa yang pernah melaksanakan sidang keliling serta mengumpulkan data-data hasil sidang keliling yang telah dilaksanakan selama 2013-2015. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa telah efektif dan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah dana yang bertambah, perkembangan teknologi, dan kerjasama yang terjalin dengan baik antara Pengadilan Agama Sungguminasa dengan instansi lainnya. Faktor penghambatnya adalah, kurang disiplinnya masyarakat, pengetahuan hukum yang kurang, serta sarana transportasi yang kurang memadai di pelosok desa. Dan terakhir pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa berimplikasi pada banyaknya daerah yang mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan. Pelayanan hukum yang diberikan lebih maksimal kepada para pencari keadilan karena biaya sidang keliling yang bertambah. Pelayanan hukum yang cepat karena 85% dari perkara yang teregister di sidang keliling langsung putus dalam sehari.

Peneliti berharap bahwa penelitian skripsi ini dapat menjadi referensi bagi para pencari keadilan untuk lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan sidang keliling, dan bagi Pengadilan Agama Sungguminasa agar dapat meningkatkan pelayanan hukum dan keadilan melalui sidang keliling.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang sangat urgent dalam tata kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Secara filosofis, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegak hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan *tauhidullah* guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, ia merupakan bagian dari suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, ia merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah saw. Dan secara sosiologis, ia lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk.¹

Pengakuan Peradilan Agama secara resmi oleh pemerintah, melalui UU RI No. 7 tahun 1989, semakin memperkuat posisi Peradilan Agama. Sejak itu hakim berwenang menjalankan keputusannya yang dilengkapi dengan prosedur dan tenaga pelaksanaannya, yaitu hukum acara dan jurusita. Dan hal itu berarti pula bahwa kedudukannya sama tingginya dengan peradilan lainnya.²

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit

¹Cik Hasan Bisri, Drs., *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*, dalam jurnal Dua Bulan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 34 Thn. VII 1997, al-hikmah & Ditbinbapera Islam, Jakarta, h.66.

²Panitia Seminar Nasional 10 tahun undang-undang peradilan agama kerjasama DITBINBAPERA Islam, Fakultas Hukum UI, dan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, *10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama*, Chasindo, Jakarta, 1999. h.29.

dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkedudukan di ibukota Kabupaten atau Kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak Kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor pengadilan tersebut. Sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).³

Tuntutan reformasi menuntut lembaga-lembaga publik termasuk Peradilan Agama tidak lagi menggunakan pola pikir sebagai penguasa yang mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang ada dibawah kekuasaannya, akan tetapi menjadi pelayan yang senantiasa memeberikan pelayananan yang maksimal bagi pencari keadilan yang menjadi tanggung jawabnya.

³Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/Sk/Tuada-Ag/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, h. 1-2.

Salah satu bentuk pelayanan maksimal yang diberikan pengadilan adalah menyelenggarakan sidang keliling guna melayani pencari keadilan yang tidak mampu baik secara ekonomi, transportasi, maupun sosial di daerah-daerah yang lokasinya jauh dari kantor Pengadilan Agama. Untuk itulah diperlukan adanya sidang keliling pengadilan guna memberi pelayanan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan yang membutuhkan.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *acces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *acces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).⁴

Sidang keliling ini sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.

Sidang diluar gedung peradilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah

⁴Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/Sk/Tuada-Ag/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, h.3

hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap.⁵

Selain sebagai bentuk pelayanan yang maksimal oleh peradilan agama, sidang keliling juga sesuai dengan asas peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 (2) dan pasal 5(2) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas- asas lain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Sudikno Mertokusumo⁶ pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda- tunda sampai bertahun- tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-

⁵Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

⁶Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty, 2002)

belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Dengan adanya sidang keliling pencari keadilan yang kurang mampu khususnya dapat sedikit terbantu karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk berperacara di pengadilan serta tidak lagi memakan waktu yang lama.

Namun dibalik cita-cita besar diberlakukannya sidang keliling masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama. Minimnya anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung membuat Pengadilan Agama hanya dapat melakukan sidang keliling beberapa kali dalam setahun. Selain itu hukum acara yang digunakan sama dengan hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan beberapa masalah terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap jawab-menjawab, dan pembuktian. Pemanggilan pihak yang tidak hadir dalam sidang keliling tetap mengacu pada tata cara pemanggilan sebagaimana biasa dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan alasan ketidakhadiran para pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu seberapa efektif sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Untuk mempermudah pembahasan maka masalah pokok tersebut dibagi keadalam submasalah yaitu :

1. Apa faktor pendukung dan penghambat jalannya sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa?
2. Bagaimana implikasi sidang keliling terhadap pelayanan hukum kepada pencari keadilan di Kabupaten Gowa?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian.

Fokus pada skripsi ini adalah menilai sejauh mana efektivitas diadadakannya sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa. Peneliti akan menilai efektivitas sidang keliling dari segi terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada penelitian ini peneliti tidak hanya menilai efektivitas sidang keliling berdasarkan satu jenis perkara saja, akan tetapi semua jenis perkara yang diterima di sidang keliling.

2. Deskripsi Fokus.

Efektivitas yang dimaksud adalah Indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana sebuah target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Sidang Keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap.⁷

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kotakabupaten atau kota.

Sungguminasa adalah kelurahan di kecamatanSomba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Daerah yang terletak sekitar 10 km dari Kota Makassar ini merupakan ibukota kabupaten Gowa.

Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan).

Kata *cepat* menunjuk kepada jalannya peradilan,

Ditentukan *biaya ringan* dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat.

D. Kajian Pustaka.

Sebelum melakukan penelitian mengenai efektivitas sidang keliling di pengadilan agama Sungguminasa kaitannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (studi kasus 2013-2015) penulis menemukan buku yang berkaitan dan menjadi pedoman dalam penilitian ini, diantaranya :

⁷PERMA No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pertama, Buku yang berkaitan dengan masalah yang akan kami bahas adalah buku karangan Roihan A. Rasyid yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Agama”.⁸ Dalam buku ini hanya menjelaskan mengenai pengertian sidang keliling, tidak secara lengkap membahas mengenai bagaimana penerapan sidang keliling di pencari keadilan serta kaitannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kedua, buku karangan DR. Ahmad Mujahidin, M.H. yang berjudul “*Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*”.⁹ Dalam buku ini hanya membahas mengenai pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak membahas bagaimana asas ini menjadi tolak ukur dalam efektivitas sidang keliling.

Selain buku penulis juga menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan peniltian ini diantaranya :

Pertama, skripsi dengan judul “Studi Hukum Islam Terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”. Skripsi ini menulis tentang tinjauan hukum islam terhadap sidang keliling dan implikasinya terhadap angka perceraian sedangkan pada penelitian kami, kami akan membahas efektivitas sidang keliling bukan hanya dari segi perceraian akan tetapi seluruh perkara yang dapat diperkarakan di sidang keliling.¹⁰

⁸Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 130-131.

⁹DR. Ahmad Mujahidin, M.H. “*Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradlan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*”, h. 8-9.

¹⁰Surya Hidayat “Studi Hukum Islam Terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2013)

Kedua, skripsi dengan judul “Efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Ponorogo Jawa Timur tahun 2013”¹¹ Skripsi ini menulis tentang bagaimana efektivitas sidang keliling terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan pada penelitian kami menilai efektivitas sidang keliling dari segi asas, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai tolak ukurnya dan lokasi penelitian yang akan kami lakukan adalah di PA Sungguminasa.

Berdasarkan beberapa buku dan karya ilmiah diatas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Efektivitas Sidang Keiling kaitannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2013-2015) belum pernah dibahas sebelumnya karena pada penelitian ini kami mengukur efektivitas sidang keliling dari segi terlaksananya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta kami tidak membatasi hanya satu jenis perkara saja, akan tetapi semua perkara yang dapat disidangkan di sidang keliling.

E. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai pada penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa, kaitannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat jalannya sidang keliling di PA Sungguminasa.

¹¹Mughniatul Ilma “Efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Ponorogo Jawa Timur tahun 2013”(Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2013)

- c. Untuk mengetahui implikasi sidang keliling terhadap pelayanan hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa.

2. Kegunaan.

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan pembaca dibidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang peradilan agama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam melihat sejauh mana sidang keliling memberikan pengaruh bagi perbaikan penegakan hukum di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru kepada pencari keadilan tentang sidang keliling yang notabene masih jarang diketahui oleh pencari keadilan luas.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Sidang Keliling.

1. Pengertian sidang keliling.

Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap.¹

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pasal 1 ayat (8) dijelaskan sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara bertahap (berkala) atau sewaktu waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan Pengadilan.²

Sidang keliling bertujuan untuk :

- a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for the poor*).
- b. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.

¹Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

²SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang pedoman pemberian bantuan hukum.

Memberikan kemudahan pelayanan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan yang baik sesuai dengan firman Allah swt pada QS. An-Nahl/16:97. :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

Artinya :

Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.³

Dan juga sesuai dengan hadits Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ... (رواه مسلم)⁴

Artinya :

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah ra. daripada Rasulullah saw., Baginda bersabda: “Barangsiapa yang meringankan daripada seorang mukmin satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan Hari Kiamat. Barangsiapa yang memudahkan kepada orang yang kesempitan, Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat.

Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa di kantor pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan.

³Al-Quran dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 378-379

⁴Mustafa Dieb Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Mistu, *Al-WAFI Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi* (Qisthi Press, 2015). h. 156.

Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling, yakni pada Bab III mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling pada Pasal 6 diatur sebagai berikut:

- 1) Ketua PA/MS membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.
- 2) Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua PA/MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
- 3) Ketua PA/MS harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kalisidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
- 4) Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan ***tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan.***
- 5) Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahihukum acara yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

- 7) Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus.
- 8) Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling.
- 9) Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkara Prodeo

B. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Yang dimaksud dengan *Sederhana* adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventaris soal yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatu yang sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum.

Biaya Ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci, transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain diluar kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.

Menurut UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang

paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.⁵

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI No.48 Tahun 2009). Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.⁶ Namun dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.

Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.⁷ Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.

⁵Sidik Sunaryo, *sistem peradilan pidana* (Cet. I; Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), h. 46.

⁶Sidik Sunaryo, *sistem peradilan pidana*, h. 46.

⁷Sidik Sunaryo, *sistem peradilan pidana*, h. 47.

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI No.48 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.⁸

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI No.48 Tahun 2009). Apabila asas sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat diwujudkan. Pembenahan sistem peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan.⁹ Semua faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan pidana kita akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif dan adil.

⁸Sidik Sunaryo, *sistem peradilan pidana*, h. 48.

⁹Sidik Sunaryo, *sistem peradilan pidana*, h. 48.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.¹ sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus, adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.²

C. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan

¹Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.

²Haris Herdiansyah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.76

dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berikut :

1. Data primer.

data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Sungguminasa. sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas di lokasi penelitian.

2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sungguminasa mengenai sidang keliling yang telah mereka laksanakan.

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Teknik wawancara.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.⁴ Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu

³S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 143.

⁴I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 37.

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵

pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara terhadap piha-pihak di Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai sidang keliling.

2. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.⁶ Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.⁷ Pada metode ini peneliti akan melakukan pengamatan pada proses masuknya perkara hingga selesai melalui sidang keliling, serta hukum acara yang digunakan pada sidang keliling.

3. Dokumentasi.

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau

⁵Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 186.

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 142.

⁷I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 37.

catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.⁸ Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁹ Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumentasi di Pengadilan Agama Sungguminasa.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian - baik secara akademik maupun logiknya¹⁰

Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.¹¹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat

⁸fitwiethayalisiyi, “penelitian kualitatif (metode pengumpulan data)”<https://fitwiethayalisiyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metodepengumpulan-data/> (24 November 2015)

⁹Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998), h. 127.

¹⁰Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfa Beta 2009), h. 305.

¹¹Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 306.

dikelolah, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹² Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

G. Pengujian Keabsahan Data

1. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.¹³

2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang

¹²Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 46

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 306.

didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.¹⁴ Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

¹⁴Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 306.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Sungguminasa.

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa.

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun-temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun

temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Departemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do'a dan imam pada shalat I'ed.

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun :

1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976)
2. K.H. Drs. Muh. Ya'la Thahir, (1976-1982)
3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984)
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992)
5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif), (-)
6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995)

7. Drs. Muh. As'ad Sanusi, S.H., (1995-1998)
8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003)
9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004)
10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007)
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H. (14 Des 2007 s/d 2012)
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015)
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d sekarang)

2. Kondisi Geografis PA Sungguminasa

Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali beralamat di Jalan Andi Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

- a. Letak astronomi gedung kantor : $5^{\circ}11'55.6''$ LS - $119^{\circ}27'11.3''$ BT
- b. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) :
 - Utara : Kota Makassar
 - Selatan : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu
 - Timur : Kecamatan Pattalassang
 - Barat : Kecamatan Pallangga
- c. Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut
- d. Kota Sungguminasa beriklim tropis

3. Visi dan Misi PA Sungguminasa.

a. Visi.

**" MEWUJUDKAN LEMBAGA YANG MEMBERIKAN JAMINAN
KEPASTIAN BAGI PENYELENGGARAAN PERADILAN DAN
PELAYANAN"**

b. Misi.

- Terwujudnya standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan
- Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh Masyarakat
- Meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi informasi
- mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja

4. Struktur Organisasi.

Ketua	: Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Drs. Ahmad Nur, M.H.
Hakim	: Dra. Salmah ZR Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. Muhamad Anwar Umar, S.Ag. Ahmad Jamil, S.Ag. Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI., M.H.
Panitera	: Hasbi, S.H.
Sekretaris	: Drs. Muhammad Amin, M.A.

Panitera Muda Gugatan	: Dra. Nadirah
Panitera Muda Permohonan	: Dra. Hj. Fitriani
Panitera Muda Hukum	: H. Kafrawi, BA
Panitera Pengganti	: Drs. M. Noor AR
	Dra. Hj. Musafirah, M.H.
	Dra. I. Damri
	Darmawati, S.Ag.
	Rahmatiah, S.H.
	A. M. Zulkarnain Chalid, S.H.
	Drs. H. S. Ahmad Abbas
	Drs. H. Misi, S.Ag.
	Hj. St. Suhrah, BA
	Hasbiyah, S.H.
	Nur Intang, S.Ag.
	Mukarramah Saleh, S.H.
	Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.
	Dra. Jasrawati
	Ibrahim, S.H.
Jurusita	: Muh. Aleks, S.H.
Juru Sita Pengganti	: Hairuddin, S.H.
	Bachra, S.H.
	Hj. Marianti, S.HI.
	Sirajuddin
	Purnama Santi

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Kasubbag Kepegawaian : Erni, S.H.

Kasubbag Perencanaan,

TI, dan Pelaporan : Verry Setya Widyatama

Kasubbag Umum dan

Keuangan : Bulgis Yusuf, S.HI., M.H.

Staf : Muh. Rusydi As'ad, S.H.

Andi Suryani M, S.Kom.

Ridwan, S.H.

Irwan Syarif, S.Ag., S.H., M.H.

5. Yurisdiksi PA Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK II Gowa, dengan letak geografis 12° 38.16' Bujur timur dari Jakarta dan 5° 33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12° 33.19' hingga 13° 15' 17' Bujur Timur dan 5° 5' hingga 5° 34.7' Lintang selatan dari Jakarta

Kabupaten Gowa berbatasan dengan :

- Sebelum Utara Kabupaten Maros
- Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar
- Sebelah Barat Kotamadya Makassar

Bahwa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa daerah Bugis Makassar, di samping bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal di ibukota Kabupaten. Wilayah administrasinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 terdiri dari 18

Kecamatan Dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 kilometer persegi atau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi Selatan. Wilayah Kab.Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 72,26%. Ada 9 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, dan Biring bulu.

6. Tupoksi PA Sungguminasa.

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. PERKAWINAN

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;

- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

b. WARIS

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris

c. WASIAT

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia

d. HIBAH

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

e. WAKAF

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. ZAKAT

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. INFAQ

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki

(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

h. SHODAQOH

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

i. EKONOMI SYARIAH

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- 1) Bank syari'ah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) Asuransi syari'ah;
- 4) Reasuransi syari'ah;
- 5) Reksa dana syari'ah;
- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) Sekuritas syari'ah;
- 8) Pembiayaan syari'ah;
- 9) Pegadaian syari'ah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- 11) Bisnis syari'ah;

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

a) Fungsi mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006).

b) Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c) Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

d) Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI nomor 3 tahun 2006).

e) Fungsi administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

f) Fungsi lainnya :

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa Kaitannya dengan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Surat Edaran Mahakamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama mendefenisikan sidang keliling merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan pengadilan.¹ Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mukhtaruddin

¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Pasal 1

B, S.HI.,M.HI. bahwa “sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan agama tetapi masih didalam wilayah yuridiksi pengadilan agama tersebut”²

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa sidang yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Agama sungguminasa sama saja dengan sidang keliling atau sidang yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama Sungguminasa, tidak ada perbedaan. Hanya tempat pelaksanaannya yang berbeda.

Meskipun demikian, terkait pelaksanaan sidang keliling ini telah diatur dalam Surat keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

1. Persiapan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa.

a. Penentuan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Sebelum menentukan tempat dan waktu sidang keliling, terlebih dahulu Pengadilan Agama mempertimbangkan daerah mana yang akan ditempati untuk melaksanakan sidang keliling. Hal yang menjadi pertimbangan disini adalah :

- 1) Adanya dana untuk pelaksanaan sidang keliling. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dr. Mukhtaruddin B, S.Hi., M.Hi. bahwa “Apabila telah ada dana untuk pelaksanaan sidang keliling maka kita baru bisa melaksanakan sidang keliling”.
- 2) Banyaknya perkara yang masuk pada daerah yang akan dituju untuk pelaksanaan sidang keliling.

²DR. Mukhtaruddin B, S.HI., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sungguminasa, 28 Januari 2016.

- 3) Daerah yang akan dituju untuk pelaksanaan sidang keliling itu jauh dari gedung Pengadilan Agama Sungguminasa sehingga para pencari keadilan sulit untuk datang langsung ke Pengadilan Agama Sungguminasa, serta sarana transportasi di daerah tersebut belum memadai. Sebagai contoh daerah yang sering didatangi oleh Pengadilan Agama untuk pelaksanaan sidang keliling yaitu, Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Tompobulu dan. Kedua daerah ini sangat jauh dari gedung Pengadilan Agama Sungguminasa dan sarana transportasinya masih terbatas.

Setelah mendapatkan lokasi yang sesuai dengan kriteria diatas, Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian menetapkan lokasi yang akan dituju dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Persiapan Sarana dan Prasarana.

Sarana yang biasa digunakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa untuk pelaksanaan sidang keliling adalah Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan. Selain mempersiapkan gedung tempat sidang keliling, Pengadilan Agama Sungguminasa juga mempersiapkan antara lain meja dan kursi sidang, palu sidang, kursi untuk para pihak yang berperkara, dll. Sarana dan prasarana disesuaikan dengan tempat yang digunakan untuk pelaksanaan sidang keliling.

c. Jenis Perkara yang dapat didaftarkan pada pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa.

a. Itsbat Nikah:

- Sebagaimana tersebut dalam Buku II.

b. Cerai Gugat:

- Gugatan cerai yang di ajukan oleh istri.

c. Cerai Talak:

- Permohonan cerai yang di ajukan oleh suami.

d. Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat / cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.

e. Hak Asuh Anak:

- Gugatan / permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.

f. Penetapan ahli Waris:

- Permohonan sebagai ahli waris yang sah.

Menurut Bapak Dr. Mukhtaruddin B, S.Hi., M.Hi bahwa “semua jenis perkara dapat diterima pada sidang keliling, namun yang di prioritaskan adalah perkara yang mudah penyelesaiannya”, hal tersebut sesuai dengan data di Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa jenis perkara yang paling dominan diajukan oleh para pencari keadilan adalah perkara cerai gugat, cerai talak, dan itsbat nikah (pengesahan nikah).

d. Petugas.

Dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa, biasanya mengikutserkatan :

- 1) 1 Majelis Hakim (Tiga Orang Hakim).
- 2) 1 Panitera Pengganti
- 3) 1 Orang petugas adnistrasi.
- 4) 1 Orang Jurusita.

2. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa.

a. Penetapan pelaksanaan sidang keliling.

Setiap akan melaksanakan sidang keliling, Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa membuat surat keputusan pelaksanaan sidang keliling yang memuat :

- 1) Lokasi/ tempat dilaksanakan sidang keliling sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.
- 2) Waktu Pelaksanaan; serta.
- 3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, juru sita pengganti, serta petugas administrasi untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

Setelah keluarnya Surat keputusan ini, Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian memberitahukan kepada pencari keadilan melalui Kantor Urusan Agama di Kecamatan waktu dan tempat pelaksanaan sidang keliling yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Menurut Dr. Mukhtaruddin B, S.Hi., M.Hi. “Biasanya setelah di informasikan di KUA, informasi mengenai sidang keliling tersebar di masyarakat dari mulut ke mulut sehingga pencari keadilan di daerah tersebut tahu bahwa akan diadakan sidang keliling”. Bapak Dr. Mukhtaruddin, B S.Hi., M.Hi. juga mengatakan bahwa “terkadang ada penggugat yang mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa yang kebetulan kediaman dari penggugat tersebut akan didatangi sidang keliling, maka kita suruh saja datang ke lokasi sidang keliling yang akan dilaksanakan di daerah kediamannya”

b. Pendaftaran Perkara Sidang keliling di Pengadilan agama sungguminasa.

Adapun tata cara pendaftaran perkara pada sidang keliling di Pengadilan Agama adalah :

- 1) Pendaftaran perkara dilakukan melalui kepanitraan Pengadilan Agama Sungguminasa. Setelah tadi pencari keadilan mendapatkan informasi mengenai sidang keliling, masyarakat dapat datang langsung ke Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mendaftarkan perkaranya yang akan disidangkan pada sidang keliling
- 2) Bagi daerah yang tidak memungkinkan untuk mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mendaftarkan perkaranya kepada petugas pengadilan yang datang terlebih dahulu sebelum sidang dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan apabila Kantor Urusan Agama telah mengumpulkan pencari keadilan yang ingin mendaftarkan perkaranya dan kemudian petugas mendaftarkan perkara mereka.
- 3) Pencari keadilan juga dapat mendaftarkan perkaranya di tempat sidang keliling yang sedang berlangsung dan perkaranya akan disidangkan pada sidang keliling selanjutnya.
- 4) Bagi pencari keadilan yang telah mendaftarkan perkaranya diwajibkan untuk membayar panjar biaya perkara. Pada sidang keliling ini, radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan data atau realitas setempat.
- 5) Setelah membayar panjar biaya perkara, pencari keadilan akan diberikan SKUM, yang kemudian akan dibawa pada saat proses persidangan pada sidang keliling.

- 6) Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara *on line* dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - 7) Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau *internetbanking*.
 - 8) Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas Pengadilan Agama Sungguminasa yang berada di lokasi sidang keliling. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau *internet banking*, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
 - 9) Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.
 - 10) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.
- c. Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan.
- 1) Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama.

- 2) Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa tentang penetapan sidang keliling.
 - 3) Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan. Jadi panitra pengganti tetap melakukan pemanggilan sesuai dengan tata cara pemanggilan yaitu paling lambat 3 hari sebelum hari persidangan.
- d. Persidangan dan Mediasi pada sidang keliling Pengadilan Agama Sungguminasa.
- 1) Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang.
 - 2) Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
 - 3) Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Mukhtaruddin, B. S.H., M.H. bahwa “hukum acara yang digunakan pada sidang keliling tetap sama dengan hukum acara yang digunakan apabila sidang di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, hanya tempatnya saja yang berbeda.”
 - 4) Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.
 - 5) Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.

e. Ikrar Talak dan Akta Cerai

- 1) Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.
- 2) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.
- 3) Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.
- 4) Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
- 5) Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau di tempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
- 6) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa.
- 7) Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.

Salah satu tujuan dari dilaksanakannya sidang keliling adalah memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada pencari keadilan yang biasanya dilaksanakan dengan kerja sama dengan Kepala Kantor Agama Kecamatan, baik dari segi penyampaian informasi kepada pencari keadilan di Wilayahnya, maupun kerjasama dengan menempatkan sidang keliling di Kantor urusan Agama Kecamatan.

Disamping hal tersebut di atas, sidang keliling juga dimaksudkan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang tertera pada SK TUADA Tentang pedoman sidang keliling. Sederhana yang dimaksudkan disini adalah proses berperkara yang tidak berbelit-belit, cepat adalah menunjuk kepada jalannya peradilan, dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat.

Berkaitan dengan pemenuhan asas sebagaimana tersebut di atas berikut ini kami akan memberikan gambaran mengenai efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa kaitannya dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan :

1. Dari segi asas Sederhana.

Dalam sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sungguminasa pencari keadilan menghadiri persidangan dengan pakaian kesehariannya dan tidak terlalu mengganggu aktifitas keseharian mereka yang biasanya apabila pencari keadilan hendak menghadiri sidang, dia harus meluangkan waktunya seharian penuh karena perjalanan ke kantor Pengadilan Agama yang jauh di Kota dan kemudian pada saat mereka tiba di Pengadilan Agama Sungguminasa mereka harus antri lagi menunggu jadwal persidangan mereka.

Walaupun hukum acara yang digunakan pada kantor Pengadilan Agama Sungguminasa dan di lokasi sidang keliling tetap sama akan tetapi proses berperkara

pada sidang keliling memberikan kemudahan-kemudahan terhadap para pencari keadilan, diantaranya proses administrasi yang sederhana. Pada pendaftaran perkara di sidang keliling, yaitu masyarakat calon pencari keadilan dikumpulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya petugas dari Pengadilan Agama Sungguminasa yang datang melakukan pendaftaran dan selanjutnya sampai sidang keliling terlaksana.

2. Dari Segi Cepat.

Masyarakat pencari keadilan dengan permasalahannya masing-masing pada umumnya menginginkan adanya pelayanan dan kepastian hukum secepatnya sehingga permasalahan yang mereka hadapi tidak berlarut-larut.

Berkaitan dengan hal tersebut, sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa merupakan jawaban dari keinginan pencari keadilan untuk secepatnya menyelesaikan permasalahannya, hal tersebut tercermin dalam pelayanan sidang keliling yang diawali kegiatan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dari masing-masing lokasi sedang keliling, dimana Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan dan mengumpulkan calon pencari keadilan, dan selanjutnya petugas dari Pengadilan Agama Sungguminasa melanjutkan proses pendaftaran, yang diawali dengan penyerahan permohonan atau gugatan oleh pencari keadilan kemudian mereka membayar biaya perkara di Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama.

Setelah proses kelengkapan berkas perkara selesai dan penetapan hari sidang dari Ketua Majelis, maka Juru sita atau Juru Sita pengganti melaksanakan panggilan sidang kepada para pencari keadilan.

Pelaksanaan panggilan sidang pada perkara selain sidang keliling panggilannya dilaksanakan satu perstu kepada pencari keadilan, akan tetapi dalam sidang keliling dapat dilaksanakan dengan cara panggilan sidang disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di lokasi sidang keliling yang selanjutnya akan disampaikan kepada pencari keadilan.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, persidangan dilaksanakan sebagaimana layaknya persidangan di gedung Pengadilan Agama Sungguminasa. Kemudian yang berkaitan dengan proses jalannya persidangan pada sidang keliling apabila pencari keadilan dibebani pembuktian dapat dengan cepat menyiapkan alat bukti baik berupa surat maupun berupa saksi apabila alat bukti yang diajukan masih kurang dengan cepat pencari keadilan menyiapkannya.

3. Dari Segi Biaya Ringan.

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, biaya berperkara merupakan salah satu momok yang menakutkan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Agama Sungguminasa, karena informasi yang beredar dari mulut ke mulut di masyarakat bahwa biaya berperkara di pengadilan itu sangat mahal sehingga banyaknya pencari keadilan yang tidak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Hal tersebut sangat berimbas pada kehidupan keseharian pencari keadilan tersebut, sebagai salah satu contoh, masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Masyarakat yang tidak memiliki buku nikah dan tidak mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Sungguminasa karena persoalan biaya tadi berakibat pada tidak dapatnya diterbitkan akta kelahiran terhadap anak dari pencari keadilan yang tidak memiliki buku nikah.

Contoh lainnya, para pencari keadilan yang telah menikah dan tidak lagi akur memilih langsung berpisah tanpa proses pengadilan karena kabar yang mereka dengar biaya untuk berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa itu sangat mahal. Sehingga nantinya apabila salah satu dari pasangan ini ingin memulai hidup baru dan menikah lagi, dia akan terkendala pada perceraian mereka yang belum sah di mata hukum yang mana ini dibuktikan dengan akta perceraian.

Dengan adanya sidang keliling ini, para pencari keadilan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk berperkara karena masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk transportasi ke kantor pengadilan agama sungguminasa. Selain biaya transportasi biaya pemanggilan juga lebih murah, dikarenakan radius pemanggilan di tetapkan berdasarkan jarak lokasi pelaksanaan sidang keliling dengan kediaman para pencari keadilan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Jalannya Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa

Sidang keliling merupakan salah satu usaha Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal serta mendekatkan pengadilan agama dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya yang baru seumur jagung ini tentu saja ada berbagai faktor yang mendukung dan menghambat jalannya sidang keliling ini.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah dana yang bertambah. dana dapat dikatakan sebagai faktor yang mendukung, sehingga pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat berjalan lancar. Karena dulunya dana yang kurang merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan sidang keliling. Kemudian,

perkembangan Teknologi yang mempermudah proses pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sejak masuknya perkara hingga putus. Contohnya setelah petugas di lokasi sidang keliling menerima berkas perkara dari pencari keadilan, dan telah membayar panjar biaya perkara di bank, petugas di lokasi sidang keliling dapat menghubungi petugas yang berada di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memasukkan perkara tersebut ke buku register. Dan terakhir kerja sama yang terjalin dengan baik antara pihak Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan sehingga proses sidang keliling dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan Menurut narasumber yang kami wawancarai, Bapak Hasbi, S.H. yang merupakan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa beberapa faktor yang menjadi penghambat jalannya sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai berikut:

“Yang pertama itu ketidak disiplin an masyarakat dalam menghadiri persidangan. Terkadang kita sudah tentukan jamnya malah masyarakat mengolor-olor waktu.

Yang kedua, tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan antara lain saksi, terkadang mereka sudah diberitahukan pada saat pembuatan gugatan bahwa harus membawa saksi tapi mereka tidak patuhi itu, mereka abaikan itulah yang mejadi kendala pada penerapan asas cepat, karena seharusnya sudah bisa disidang tetapi harus ditunda lagi sampai pemohon menghadirkan saksi. Terkadang seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi dia tidak mengetahui apa yang harus dia persaksikan itu juga termasuk

mengulur waktu. Terkadang ada saksi yang terus terang bahwa sebenarnya saya tidak tahu mengenai perkara ini tetapi saya dipanggil menjadi saksi.

Yang ketiga, akses masyarakat dari pelosok ke tempat sidang keliling. Disana kan masih jarang transportasi umum, terkadang masyarakat yang dari pelosok desa ini hanya menunggu ada mobil lewat kemudian menumpang ikut untuk berangkat ke tempat sidang keliling. Dan hal ini rata-rata terjadi di tempat sidang keliling yang wilayahnya luas. Hal ini termasuk menghambat jalannya persidangan karena biasa kita panggil sidang jam 9, tetapi datang jam 1 karena itu tadi kurangnya sarana transportasi ditambah lagi jarak tempuh yang jauh dari kediaman masyarakat yang berperkara ke tempat sidang keliling yang biasanya dilaksanakan di kota kecamatan.³

Kemudian selain hal diatas, banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada saat sidang keliling juga menyulitkan Panitra Pengganti untuk melakukan minutasi ketika kembali ke kantor karena banyaknya perkara yang bertumpuk.

Dari keterangan narasumber diatas kita bisa melihat bahwa hambatan terbesar pada pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa adalah pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai apa saja yang harus dihadirkan pada saat persidangan, baik itu bukti-bukti dan sebagainya. Kemudian kurang disiplinnya masyarakat, sehingga perkara mereka yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, menjadi tertunda. Dan yang terakhir sarana transportasi yang masih kurang memadai di pelosok-pelosok desa, sehingga masyarakat yang seharusnya bisa cepat datang terkendala lagi dengan transportasi.

³Hasbi, S.H., Panitra Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sungguminasa, Februari 2016.

D. Implikasi Sidang Keliling Terhadap Pelayanan Hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa

Sebelum membahas mengenai implikasi sidang keliling terhadap pelayanan hukum di PA Sungguminasa, kami terlebih dahulu akan menyajikan data sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

Tahun 2013

Wilayah : **PTA MAKASSAR** Satker : **PA. SUNGGUMINASA** Tahun : **2013** **Tampilkan**

LAPORAN SIDANG KELILING DIPA DAN NON DIPA																				
NO URUT	NAMA SATKER	JUMLAH KEGIATAN SIDANG KELILING DIPA/NON DIPA												TOTAL KEGIATAN SIDANG KELILING	ANGGARAN					
															DIPA			NON DIPA		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		SEMUA BULAN	PAGU	REALISASI	SISA	PAGU	REALISASI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	C	D	E	F	G	H	I
1	PA. SUNGGUMINASA	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	2	-	9	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	1	0	0	0	1	3	2	2	0	9	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	Kantor Urusan Agama Kec. Tinggimoncong Kelurahan Malino	Senin, 01 April 2013	Insidentil	1	1	3	3	1	1	0	0	5
				1	1	3	3	1	1	0	0	5

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TOMPOBULU KELURAHAN MALAKAJI	Kamis, 15 Agustus 2013	Insidentil	0	0	2	0	1	0	0	0	3
				0	0	2	0	1	0	0	0	3

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	Kantor Urusan Agama Kec. Tinggimoncong Kelurahan Malino	Kamis, 12 September 2013	Insidentil	0	0	4	2	1	0	0	0	5
2	KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TOMPOBULU KELURAHAN MALAKAJI	Kamis, 19 September 2013	Insidentil	1	1	1	1	0	0	0	0	2
3	Kecamatan Bontonompo Selatan Desa Sengka	Kamis, 26 September 2013	Insidentil	2	1	0	0	0	0	0	0	2
				3	2	5	3	1	0	0	0	9

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	Kantor Urusan Agama Kec. Tinggimoncong Kelurahan Malino	Kamis, 03 Oktober 2013	Insidentil	0	0	1	0	2	1	0	0	3
2	Kantor Urusan Agama Kec. Tinggimoncong Kelurahan Malino	Kamis, 17 Oktober 2013	Insidentil	0	0	0	0	2	1	1	1	3
				0	0	1	0	4	2	1	1	6

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TOMPOBULU KELURAHAN MALAKAJI	Rabu, 06 November 2013	Insidentil	0	0	4	4	0	0	0	0	4
2	Kantor Urusan Agama Kec. Tinggimoncong Kelurahan Malino	Kamis, 07 November 2013	Insidentil	0	0	1	1	0	0	1	1	2
				0	0	5	5	0	0	1	1	6

Tahun 2014

 Wilayah : Satker : Tahun :

LAPORAN SIDANG KELILING DIPA DAN NON DIPA

NO JRUT	NAMA SATKER	JUMLAH KEGIATAN SIDANG KELILING DIPA/NON DIPA												TOTAL KEGIATAN SIDANG KELILING	ANGGARAN					
															DIPA			NON DIPA		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		SEMUA BULAN	PAGU	REALISASI	SISA	PAGU	REALISASI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	C	D	E	F	G	H	I
1	PA. SUNGGUMINASA	0	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	6	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	6	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	KUA Kecamatan Tinggimoncong Kelurahan Malino	Kamis, 03 April 2014	Insidentil	2	2	3	2	0	0	0	0	5
2	KUA Kec. Tombolo Pao Kelurahan Tamaona	Rabu, 30 April 2014	Insidentil	2	1	3	2	1	0	1	1	7
				4	3	6	4	1	0	1	1	12

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	KUA Kecamatan Tinggimoncong Kelurahan Malino	Senin, 19 Mei 2014	Insidentil	0	0	1	1	2	1	0	0	3
2	KUA Kec. Tompobulu Kelurahan Malakaji	Jumat, 30 Mei 2014	Insidentil	1	0	3	2	0	0	0	0	4
				1	0	4	3	2	1	0	0	7

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	KUA Kecamatan Tinggimoncong Kelurahan Malino	Rabu, 25 Juni 2014	Insidentil	0	0	1	1	1	1	0	0	2
				0	0	1	1	1	1	0	0	2

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	KUA Kecamatan Tinggimoncong Kelurahan Malino	Senin, 15 September 2014	Insidentil	1	1	7	5	1	0	0	0	0
				1	1	7	5	1	0	0	0	0

Tahun 2015

 Wilayah : PTA MAKASSAR Satker : PA. SUNGGUMINASA Tahun : 2015 Tampilkan

LAPORAN SIDANG KELILING DIPA DAN NON DIPA

NO URUT	NAMA SATKER	JUMLAH KEGIATAN SIDANG KELILING DIPA/NON DIPA												TOTAL KEGIATAN SIDANG KELILING	ANGGARAN					
															DIPA			NON DIPA		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		SEMUA BULAN	PAGU	REALISASI	SISA	PAGU	REALISASI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	C	D	E	F	G	H	I
1	PA. SUNGGUMINASA	0	3	0	0	1	3	0	0	3	4	3	5	22	32.400.000	29.700.000	2.700.000	0	0	0
TOTAL		0	3	0	0	1	3	0	0	3	4	3	5	22	32.400.000	29.700.000	2.700.000	0	0	0

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	KUA Kecamatan Tinggimoncong Kelurahan Malino	Kamis, 12 Februari 2015	Insidentil	0	0	2	2	2	2	0	0	4
2	KUA Kecamatan Biringbulu Kelurahan Lauwa	Rabu, 25 Februari 2015	Insidentil	0	0	3	2	0	0	0	0	3
3	KUA Kecamatan Tinggimoncong Kelurahan Malino	Kamis, 26 Februari 2015	Insidentil	2	2	2	2	0	0	0	0	4
				2	2	7	6	2	2	0	0	11

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	KUA Kecamatan Bontomarannu Kelurahan Bili-Bili	Rabu, 27 Mei 2015	Insidentil	0	0	3	3	2	0	0	0	5
				0	0	3	3	2	0	0	0	5

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	KUA Kecamatan Tompobulu Kelurahan Malakaji	Kamis, 11 Juni 2015	Insidentil	0	0	5	5	0	0	1	1	6
2	KUA Kecamatan Tompobulu Kelurahan Malakaji	Rabu, 24 Juni 2015	Insidentil	12	12	0	0	0	0	0	0	12
3	KUA Kecamatan Tinggimoncong Kelurahan Malino	Jumat, 26 Juni 2015	Insidentil	1	1	4	3	2	2	0	0	7
				13	13	9	8	2	2	1	1	25

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	KUA Kec. Tinggimoncong Kelurahan Malino	Kamis, 10 September 2015	Insidentil	1	1	2	2	1	1	0	0	4
2	KUA Kecamatan Tompobulu Kelurahan Malakaji	Selasa, 22 September 2015	Insidentil	0	0	4	4	0	0	0	0	4
3	KUA Kecamatan Tinggimoncong Kelurahan Malino	Selasa, 22 September 2015	Insidentil	2	2	2	1	1	1	0	0	5
				3	3	8	7	2	2	0	0	13

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	KUA Kecamatan Tompobulu Kelurahan Malakaji	Selasa, 06 Oktober 2015	Insidentil	8	6	0	0	0	0	0	0	8
2	KUA Kecamatan Tompobulu Kelurahan Malakaji	Senin, 26 Oktober 2015	Insidentil	4	4	0	0	0	0	0	0	4
3	KUA Kecamatan Tinggimoncong Kelurahan Malino	Rabu, 28 Oktober 2015	Insidentil	0	0	2	2	1	1	0	0	3
4	KUA Kecamatan Bungaya Kelurahan Sapaya	Jumat, 30 Oktober 2015	Insidentil	2	0	2	2	0	0	0	0	0
				14	10	4	4	1	1	0	0	15

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Status	Jumlah Perkara								Jml pkr yg Disidangkan
				IN R	IN P	CG R	CG P	CT R	CT P	L R	L P	
1	KUA Kec. Bontonompo Kelurahan Bajeng	Jumat, 13 November 2015	Insidentil	0	0	3	2	0	0	0	0	3
2	KUA Kecamatan Tompobulu Kelurahan Malakaji	Jumat, 20 November 2015	Insidentil	1	1	3	1	0	0	0	0	4
3	KUA Kecamatan Tompobulu Kelurahan Malakaji	Senin, 23 November 2015	Insidentil	4	4	1	1	0	0	0	0	5
				5	5	7	4	0	0	0	0	12

Keterangan :

IN R : Itsbat Nikah Register. Artinya perkara itsbat nikah yang terdaftar pada sidang keliling

IN P : Itsbat Nikah Putus. Artinya istbat nikah yang putus pada saat pelaksanaan sidang keliling

CG R : Cerai Gugat Register. Artinya perkara cerai gugat yang terdaftar pada sidang keliling.

CG P : Cerai Gugat. Artinya Perkara Cerai Gugat yang putus pada saat pelaksanaan sidang keliling

L R : Lainnya Register. Artinya lain yang terdaftar pada saat pelaksanaan sidang keliling.

L P : Lainnya Putus. Artinya perkara lain yang putus pada pelaksanaan sidang keliling.

Berdasarkan tabel diatas kita dapat melihat bahwa implikasi sidang keliling terhadap pelayanan hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

1. **Memberikan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat.** Dari Segi Jumlah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah pelaksanaan sidang keliling, walaupun pada tahun 2014 terjadi penurunan pelaksanaan sidang keliling akan tetapi tahun 2015 Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan sidang keliling sebanyak 22 kali. Angka ini jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 6 kali sidang keliling pada tahun 2014 dan 9 kali sidang keliling pada tahun 2013. Dari sini kita dapat melihat bahwa masyarakat sudah mulai merasakan pelayanan hukum yang lebih baik melalui sidang keliling yang

dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga masyarakat tidak lagi segan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa.

2. **Semakin banyak daerah yang memperoleh pelayanan hukum.** Kita bisa melihat peningkatan dari segi tempat pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Pada tahun 2013, Pengadilan Agama Sungguminasa di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Bontonompo Selatan. Kemudian pada tahun 2014 Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan sidang keliling di Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Tombolo Pao, Sedangkan pada tahun 2015 Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan sidang keliling di banyak lokasi, tepatnya di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bonto Marannu, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Pallangga. Dari sini kita dapat melihat bahwa dari tahun ke tahun, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan sidang keliling di banyak Kecamatan di Kabupaten Gowa. Sehingga hampir seluruh pencari keadilan yang ada di Wilayah Kabupaten Gowa dapat merasakan pelayanan hukum yang optimal oleh Pengadilan Agama Sungguminasa melalui sidang keliling.
3. **Biaya yang bertambah berimplikasi pada pelayanan yang maksimal.** Jika dilihat dari segi biaya pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Kita dapat melihat bahwa anggaran dari tahun 2013 ke tahun 2014 sama yaitu Rp.7.200.000,- dan pada tahun 2015 anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling naik sekitar 4 kali lipat yaitu Rp. 32.400.000,-. Peningkatan ini tentu saja memiliki pengaruh besar terhadap jalannya sidang

keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sungguminasa, karena dulunya kendala yang paling besar dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah kurangnya anggaran untuk melaksanakan sidang keliling. Setelah bertambahnya anggaran ini tentu saja pelayanan yang diberikan oleh petugas sidang sidang keliling lebih maksimal serta pelaksanaan sidang keliling dapat menjadi lebih sering dan teratur sehingga semakin banyak masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gowa yang dapat menyelesaikan perkaranya dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. **Semakin banyak masyarakat yang memperoleh kepastian hukum dengan cepat.** Dari segi perkara yang masuk pada pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Perkara yang paling dominan didaftarkan pada sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah perkara itsbat nikah, cerai gugat, dan cerai talak. Pada tahun 2013, jumlah perkara Itsbat nikah yang diregister adalah 4 perkara dan 3 diantaranya putus. Kemudian perkara cerai gugat yang diregister sebanyak 15 dan 11 diantaranya putus. Selanjutnya perkara cerai talak yang diregister sebanyak 7 perkara dan 3 diantaranya putus. Dan terakhir ada 2 perkara lain yang diregister dan semuanya putus. Pada tahun 2014, jumlah perkara itsbat nikah yang diregister sebanyak 6 dan 4 diantaranya putus. Kemudian perkara cerai gugat yang diregister sebanyak 18 dan 13 diantaranya putus. Selanjutnya perkara cerai talak yang diregister sebanyak 5 dan 2 diantaranya putus. Dan terakhir ada 1 perkara lain dan perkara tersebut putus. Pada tahun 2015, jumlah perkara itsbat nikah yang diregister sebanyak 43 dan 39 diantaranya putus. Kemudian perkara cerai gugat yang diregister sebanyak 50 perkara dan 44 diantaranya putus. Selanjutnya perkara

cerai talak yang diregister sebanyak 9 perkara dan 5 diantaranya putus. Dan terakhir perkara lain yang diregister sebanyak 1 perkara dan perkara tersebut putus. Dari uraian data diatas kita bisa melihat bahwa dari tahun 2013 ke tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah perkara yang diterima pada sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa. Peningkatan yang paling tinggi adalah perkara itsbat nikah, ini membuktikan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan pelayanan hukum dan keadilan yang memuaskan. Karena pelayanan hukum dan keadilan pada sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa memberikan banyak kemudahan bagi para pencari keadilan, diantaranya pendaftaran perkara lebih mudah karena masyarakat bisa mendaftarkan perkaranya melalui petugas yang telah diutus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Kemudian masyarakat juga dapat lebih cepat mendapatkan kepastian hukum serta masyarakat tidak lagi direpotkan dengan biaya-biaya yang mahal dalam menyelesaikan perkaranya.

Dapat kita simpulkan bahwa sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pelayanan hukum dan keadilan di Kabupaten Gowa. Diantaranya, semakin banyak daerah yang didatangi oleh Pengadilan Agama Sungguminasa untuk sidang keliling sehingga pelayanan hukum dan keadilan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dapat dirasakan oleh pencari keadilan di berbagai daerah di Kabupaten Gowa. Dana untuk pelaksanaan sidang keliling yang bertambah mempengaruhi pelayanan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, dan yang terakhir para pencari keadilan semakin sadar akan hak nya untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Agama

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan terkait dengan efektivitas sidang keliling kaitannya dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (studi kasus Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2013-2015). Kami menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah efektif. Efektivitas ini diukur dari terlaksananya asas sederhana yang mana masyarakat tidak lagi dihadapkan dengan administrasi yang berbelit-belit karena petugas Pengadilan Agama Sungguminasa yang datang ke lokasi sidang keliling dan menerima pendaftaran perkara. Kemudian terlaksananya asas cepat dilihat dari proses penyelesaian perkara pada sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa yang cepat, karena 85% dari perkara yang terdaftar, putus dalam waktu sehari. Dan yang terakhir terlaksananya asas biaya ringan dapat dilihat dari radius pemanggilan pada sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dihitung dari tempat sidang keliling ke kediaman pihak yang berperkara, selain itu masyarakat dapat menghemat biaya transportasi karena sidang keliling dilakukan di daerah mereka.
2. Faktor yang mendukung terlaksananya sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah yang pertama, dana yang mencukupi untuk pelaksanaan sidang keliling. Yang kedua, perkembangan IT yang memudahkan petugas Pengadilan Agama Sungguminasa di lokasi sidang keliling berhubungan dengan petugas yang berada di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal

3. Pendaftaran perkara serta adanya SIADPA yang memudahkan pendaftaran hingga pelaporan sidang keliling. Adapun faktor yang menghambat jalannya sidang keliling di Pengadilan agama sungguminasa yaitu pertama, Masyarakat tidak disiplin soal waktu dalam menghadiri persidangan. Yang kedua, masyarakat masih kurang paham mengenai apa-apa saja yang harus dihadirkan pada saat persidangan. Dan yang ketiga, transportasi yang kurang memadai di daerah pelosok sehingga menyulitkan para pencari keadilan untuk datang dari kediamannya ke lokasi sidang keliling. Dan yang terakhir adalah kerjasama yang terjalin dengan baik antara Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan dengan Pengadilan Agama Sungguminasa sehingga proses sidang keliling dapat berjalan dengan lancar.
4. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa berimplikasi terhadap pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Gowa. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyak daerah yang didatangi oleh Pengadilan Agama Sungguminasa untuk sidang keliling sehingga pelayanan hukum dan keadilan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dapat dirasakan oleh pencari keadilan di berbagai daerah di Kabupaten Gowa. Dana untuk pelaksanaan sidang keliling yang bertambah memberikan pengaruh terhadap pihak Pengadilan Agama Sungguminasa sehingga dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang maksimal. dan yang terakhir para pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum dengan cepat melalui sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa karena 85% dari perkara yang terdaftar pada sidang keliling, langsung putus dalam waktu sehari saja.

B. Saran.

Setelah melakukan penelitian mengenai efektivitas sidang keliling kaitannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (studi kasus Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2013-2015) maka kami memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar lebih intens lagi dalam mensosialisasikan adanya sidang keliling ini. Karena walaupun Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan banyak sidang keliling, akan tetapi masih ada juga pencari keadilan yang belum tahu apa itu sidang keliling.
2. Kepada Lembaga Bantuan Hukum, LSM, Paralegal dan seluruh aktivis hukum agar dapat memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan baik itu berupa pendampingan atau penyuluhan dan sebagainya agar para pencari keadilan yang masih kurang paham mengenai apa-apa saja yang harus dihadirkan dalam persidangan sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancar.
3. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Gowa agar dapat menyediakan akses transportasi yang layak bagi para pencari keadilan yang berada di pelosok-pelosok desa agar para pencari keadilan yang berada di Kabupaten Gowa dapat dengan mudah memperoleh kepastian hukum melalui sidang keliling.

DAFTAR PUSTAKA.

- Al-Quran dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cendana Press. 1983.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*. dalam jurnal Dua Bulan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 34 Thn. VII 1997. Jakarta: al-hikmah & Ditbinbapera Islam, 1997.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Fitwiethayalisiyi, “penelitian kualitatif (metode pengumpulan data)”<https://fitwiethayalisiyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metodepengumpulan-data/>
- Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press.1998.
- Herdiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayat, Surya. “Studi Hukum Islam Terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2013.
- Ilma, Mughniatul. “Efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Ponorogo Jawa Timur tahun 2013”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2013.
- Islam dan Masyarakat, *10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama*, Chasindo, Jakarta, 1999.
- Maleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mujahidin, Ahmad “*Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*.”
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Panitia Seminar Nasional 10 tahun undang-undang peradilan agama kerjasama DITBINBAPERA Islam, Fakultas Hukum UI, dan Pusat Pengkajian Hukum
- Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu Di Pengadilan.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 34 ayat (2).
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta
- Sunaryo, Sidik. *sistem peradilan pidana*. Cet. I; Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Surat keputusan ketua muda mahkamah agung RI urusan lingkungan peradilan agama no. 01/sk/tuada-ag/i/2013 tentang pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2006
- Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Hasbi, S.H. Panitra Pengadilan Agama Sungguminasa



Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2013



Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2014